

Evaluation of the Regional Inflation Control Team's (TPID) Performance on the Medan City Economy

Evaluasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap Perekonomian Kota Medan

Siti Nurhalizah Lubis¹⁾; Andri Soemitra²⁾

^{1,2)} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ lubissitinurhalizah@gmail.com; ¹⁾ andrisoemitra@gmail.com

How to Cite :

Lubis, S. N., Soemitra, A. (2022). *Evaluation of the Regional Inflation Control Team's (TPID) Performance on the Medan City Economy*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [10 April 2022]

Revised [20 April 2022]

Accepted [25 April 2022]

KEYWORDS

Inflation, Performance, Regional Inflation Control Team, economy

This is an open access article under the CC-BY-SA license



ABSTRAK

Inflasi ialah indikator makroekonomi yang sangat berguna sebab berdampak pada nilai uang sehingga akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Secara umum, inflasi didefinisikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum yang berkepanjangan pada suatu perekonomian. Inflasi sebagai gejala peningkatan harga-harga yang bersifat umum serta berlangsung secara berkepanjangan. Peningkatan harga secara umum yang bisa diklaim sebagai inflasi. Peningkatan harga di komoditas khusus yang terjadi disebabkan oleh faktor musiman, contohnya mendekati hari-hari besar atau dikarenakan gangguan serta tidak memiliki dampak susulan, tidak dianggap inflasi. Penelitian ini mengevaluasi perihal kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap kota Medan.

ABSTRACT

Inflation is a macroeconomic indicator which very important because it affects the value of money so the impact is directly felt by the public. In general, inflation is defined as a continuous increase in the public prices of an economy. Inflation is a symptom of rising prices that are general and take place continuously. Only a general increase in prices can be called inflation. An increase in the price of certain commodities due to seasonal factors, as an example ahead of big days or a temporary supply disruption and has no further effect, is not called inflation. This study evaluates the performance of the Regional Inflation Control Team (TPID) for the city of Medan..

PENDAHULUAN

Inflasi artinya suatu persoalan yang bisa menghambat kesinambungan perekonomian pada suatu negara. Indonesia sudah beberapa kali mengalami dilema inflasi serta hampir membangkrutkan perekonomian nasional. Pengetahuan inflasi yang buruk yaitu ketika Indonesia menghadapi 4 krisis. Pertama, inflasi yang merupakan dampak krisis ekonomi yang timbul di pertengahan tahun 1960. Tepatnya pada tahun 1964. Menyentuh angka 135%, lalu meninggi lebih buruk lagi menyentuh nyaris 600% tahun 1965. Kedua, inflasi menjadi dampak krisis ekonomi setelah era bom minyak bumi tahun 1982. Ketiga, inflasi yang merupakan dampak krisis keuangan Asia tahun 1997/1998. Keempat, inflasi menjadi dampak jatuhnya institusi keuangan global Lehman Brothers di tahun 2008 atau yang diketahui sebagai Global Financial Crisis (Baca Thee Kian Wie, 2010).

Dampak dari inflasi tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional biasanya memiliki rata-rata 7% per tahun, contohnya disaat era Orde Baru (1970-1996) merosot drastis menjadi minus 13% di tahun 1998. Sama halnya dengan inflasi yang merupakan dampak krisis keuangan dunia yang merosotkan pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 6% sejak periode 2004-2007 turun merosot lebih 5%. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah mempunyai kepedulian besar terhadap inflasi.

Setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan inflasi. Cost push inflation ialah inflasi yang ditimbulkan oleh meningkatnya harga barang serta jasa yang dipergunakan pada proses produksi. Demand pull inflation ialah inflasi yang ditimbulkan dari meningkatnya satu, kombinasi atau semua variabel pada aggregate demand yang melebihi aggregate supply. Ketiga, inflasi yang ditimbulkan karena adanya keinginan masyarakat maupun pelaku ekonomi terhadap peluang adanya kenaikan harga-harga barang serta jasa secara umum saat periode tertentu (Expected Inflation). Keempat, inflasi yang ditimbulkan oleh depresiasi nilai tukar serta peningkatan harga barang impor (Import Inflation).

LANDASAN TEORI

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Pemerintah serta Bank Indonesia membuat Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) pada level pusat pada tahun 2005. Penguatan koordinasi yang diteruskan dengan membuat Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) di tahun 2008.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID ialah tim yang mempunyai tugas meninjau serta merencanakan prosedur untuk mengatasi persoalan inflasi terlebih lagi di daerah. Pada keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, menyebutkan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah yaitu:

- a. Melaksanakan penggabungan data serta informasi mengenai harga barang kebutuhan pokok maupun jasa di tingkat provinsi.
- b. Menata prosedur pengendalian inflasi di tingkat provinsi melalui pengamatan prosedur pengendalian inflasi nasional
- c. Melaksanakan usaha agar meningkatkan sistem logistik di tingkat provinsi
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
- e. Melaksanakan prosedur yang lain untuk menyelesaikan kendala serta persoalan pengendalian inflasi di tingkat provinsi.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati/Walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dan sekretaris serta anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan inflasi. Tim pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota memberitahukan hasil penerapan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.

Ketetapan tentang prosedur dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dirancang dengan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim Pengendalian Pusat. Dengan demikian, semua dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- a. Tim pengendalian inflasi pusat ditugaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber lain yang valid.
- b. Tim pengendalian inflasi daerah provinsi ditugaskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan sumber lain yang valid.

- c. Tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten/Kota ditugaskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan sumber lain yang valid.

Kedudukan Gubernur Bank Indonesia pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Pejabat Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota tidak membatasi kekuasaan serta independensi penerapan tugas serta peranan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inflasi

Peningkatan harga yang merupakan pemicu timbulnya inflasi dapat dikelompokkan serta apabila harga meningkat secara berangsur-angsur sehingga inflasi yang terjadi dikenal dengan sebutan "Creeping Inflation". Apabila harga naik secara drastis maka keadaan tersebut dikenal dengan sebutan "Hyperinflation" ataupun inflasi yang lebih dari 50% per bulan ataupun melebihi 1% per hari.

Inflasi biasanya memakai indikator yang dikenal sebagai Consumer Price Index (CPI) ataupun Indeks Harga Konsumen (IHK). Pergantian IHK ini membuktikan bahwa pergeseran harga dari paket barang serta jasa yang dikonsumsi masyarakat. Di Indonesia, IHK ini didapatkan dengan survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara Deflator PDB mendeskripsikan perhitungan level harga barang akhir (final goods) serta jasa yang diproduksi pada suatu perekonomian. Deflator PDB didapatkan dan dibagi PDB dengan dasar harga nominal dengan PDB dengan dasar harga konstan.

Di Indonesia, angka inflasi ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan cara perhitungan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK artinya nilai indeks yang menghitung harga rata-rata barang serta jasa yang dikonsumsi rumah tangga.

Bank Sentral (Bank Indonesia) menganggap penting terwujudnya keseimbangan harga, sebab inflasi yang tinggi serta tidak seimbang akan dampak buruk pada keadaan sosial ekonomi masyarakat, yaitu:

1. Inflasi yang tinggi mengakibatkan pendapatan masyarakat akan terus merosot lalu yang akan terjadi ialah semua orang, terlebih lagi orang miskin akan semakin miskin.
2. Inflasi yang tidak seimbang akan membentuk keraguan bagi pelaku ekonomi pada pengambilan keputusan. Pengalaman empiris mengungkapkan bahwa inflasi yang tidak seimbang akan menyusahkan ketetapan masyarakat terhadap konsumsi, investasi serta produksi yang kemudian akan menyusutkan pertumbuhan ekonomi.
3. Tingkat inflasi domestik yang tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara lain (negara tetangga) akan mengakibatkan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak bersaing maka akan berdampak pada nilai rupiah.

Ada beberapa penyebab terjadinya inflasi diantaranya sebagai berikut:

1. Inflasi yang terjadi dikarenakan tarikan permintaan (demand pull inflation). Permintaan masyarakat terhadap barang serta jasa terus menerus menghadapi kenaikan sedangkan disisi lain kapasitas produk tidak dapat dinaikkan. Peningkatan permintaan dikarenakan naiknya jumlah penduduk serta meningkatnya jenis maupun jumlah kebutuhan masyarakat.
2. Inflasi yang terjadi dikarenakan dorongan produksi. (cosh push inflation). Terjadinya peningkatan biaya yang cepat dibandingkan dengan produktivitas serta efisiensi. Akhirnya perusahaan menurunkan supply barang maupun jasa. Selain itu, inflasi dorongan produksi juga dapat terjadi dikarenakan: para buruh terdesak untuk menanggapi kenaikan upah yang melewati tingkat produktivitasnya. Para pengusaha yang meningkatkan harga pada tiap jenis barang yang telah diproduksi karena keinginan untuk memperoleh laba yang lebih tinggi. Harga bahan

mentah melonjak yang menyebabkan perusahaan harus membayar bahan mentah lebih mahal.

Dalam ekonomi konvensional ada beberapa cara dalam mengatasi inflasi diantaranya yaitu:

1. Kebijakan moneter, kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh bank sentral agar jumlah uang yang beredar dimasyarakat tetap stabil. Sasaran utama dalam kebijakan moneter adalah mengurangi jumlah uang beredar.
2. Kebijakan fiskal, kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk menyasarkan, memfokuskan serta menempatkan ekonomi suatu negara dengan melalui pengeluaran serta pendapatan (pajak) pemerintah.

Ada beberapa metode pendekatan dalam pengukuran inflasi, diantaranya yaitu:

1. Metode Trimming, ialah metode dalam mengukur inflasi inti dengan cara pemangkasan secara acak (random). Metode ini cukup sulit dijelaskan kepada masyarakat.
2. Metode Exclusion, ialah metode dalam mengukur inflasi dengan cara perhitungan yang mudah dipahami, simpel serta cakupan komoditasnya tetap.
3. Metode Struktural, ialah metode dalam mengukur inflasi dengan cara menyertakan beberapa variabel yang memiliki hubungan dekat dengan inflasi dalam sistem persamaan Structural Vector Autoregression (SVAR).

Inflasi Dalam Islam

Dalam ekonomi Islam penyebab terjadinya inflasi menurut Al-Maqrizi Tagyudin (1996:412) yaitu sebagai berikut:

1. Natural Inflation, merupakan inflasi yang terjadi secara alami yang manusia bahkan tidak dapat mencegahnya. Contohnya adalah ketika terjadinya bencana alam seperti gempa, banjir, kekeringan, tanah longsor dan sebagainya. Bencana tersebut terjadi atas kuasa Allah SWT. Bencana alam tersebut akan menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian yang kemudian akan menyebabkan kelangkaan bahan-bahan pokok. Apabila hal ini berlangsung secara berangsur-angsur maka akan mengakibatkan menurunnya perekonomian suatu negara bahkan menyebabkan kelaparan hingga kematian. Hal ini tentunya akan sangat merugikan negara.
2. Human Error Inflation, ialah inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Ada beberapa kesalahan manusia yang menyebabkan terjadinya inflasi yaitu: korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang menyebabkan kerugian bagi negara tersebut, pendapatan negara menurun. Di Indonesia korupsi sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan tidak hanya pada pejabat saja melainkan masyarakat. Hal ini tentunya tidak boleh disepelekan, harus ada tindakan tegas oleh pemerintah mengenai korupsi.

Cara mengatasi inflasi dalam ekonomi Islam yaitu:

1. Melaksanakan Kebijakan Fiskal. Apabila menerapkan kebijakan fiskal di Baitul Mal akan berdampak positif terhadap investasi, penawaran agregat serta berdampak pada inflasi juga pertumbuhan ekonomi.

Cetak uang dengan jumlah yang rendah. Alangkah baiknya jika pemerintah mencetak uang pada tingkat minimal yang dibutuhkan suatu negara untuk bertransaksi. Apabila negara mencetak uang dengan jumlah yang banyak maka tentunya berdampak buruk bagi perekonomian. Banyaknya uang beredar merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi, menurunnya nilai mata uang dan meningkatnya harga barang di pasaran.

METODE PENELITIAN

Ketika melakukan penelitian tentu saja dibutuhkan sebuah metode yang cocok dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Secara garis besar metode penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dengan maksud dan kepentingan khusus. (Sugiyono, 2012 : 107).

Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif ialah metode penelitian yang sesuai pada filsafat postpositivisme dipakai agar mengusut pada syarat objek yang alamiah

Penelitian deskriptif kualitatif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan, mengilustrasikan, mengungkapkan, menelaah dan menanggapi secara lebih spesifik persoalan yang akan diteliti dengan menelaah sebaik mungkin oleh perorangan, komunitas maupun suatu keadaan. Pada penelitian kualitatif manusia ialah instrumen penelitian serta hasil penulisannya berupa kata-kata maupun penjelasan yang cocok dengan kondisi yang senyatanya. Selain itu penelitian ini menganalisis, mengkaji, menelaah serta membedah 20 artikel yang mengulas tentang Inflasi, Pengendalian Inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah serta moneter. Artikel yang terkumpul ialah artikel tahun 2006 hingga 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inflasi dipengaruhi oleh faktor-faktor mendasar diantaranya hubungan antara permintaan serta penawaran terhadap barang maupun jasa, lingkungan eksternal yaitu nilai tukar mata uang, harga komoditi internasional. Selain faktor mendasar, faktor non-mendasar diantaranya ialah inflasi makanan yang terlalu tinggi, yang dipengaruhi oleh bahan makanannya sendiri contohnya hasil panen yang merosot, gangguan dari bencana alam (banjir, angin topan, longsor, dll), serta faktor kebijakan pemerintah yang biasanya dipengaruhi oleh pengumuman harga yang ditetapkan pemerintah contohnya harga subsidi BBM, listrik, transportasi umum, dan lainnya.

Maka dilakukan pengendalian inflasi agar menahan peningkatan laju inflasi yang terlalu tinggi serta penurunan (deflasi) yang terlalu rendah atau mencegah timbulnya dampak buruk di kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.

Inflasi yang terjadi di Indonesia sangat ditentukan oleh faktor kejutan (shock), faktor ini mempunyai dampak yang sangat penting yang mengakibatkan gangguan produksi juga distribusi. Bentuk faktor kejutan ini diantaranya ialah bencana alam yang akan sangat berpengaruh pada komoditi pangan (volatile food) yang mengganggu sistem produksi serta distribusinya.

Selanjutnya faktor kejutan lain yaitu peningkatan Bahan Bakar Minyak, dimana akibat dari peningkatan bahan bakar tersebut akan mempunyai dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat, faktor tersebut juga berdampak besar terhadap komoditi yang harganya diatur oleh pemerintah (administrated price). Hal ini tentunya akan menurunkan daya beli masyarakat serta akan ikut berimbas juga pada perekonomian di Indonesia (Dharma:2015).

Pengendalian Inflasi Di Indonesia

Dalam mengendalikan inflasi pemerintah tentunya menerapkan kebijakan moneter untuk menjaga keseimbangan nilai rupiah yang tergambar dari laju inflasi yang rendah serta seimbangnyanya nilai tukar. Kebijakan moneter dipergunakan untuk dapat meminimalisir berbagai akibat yang berpotensi menumbuhkan tekanan inflasi.

Untuk mengendalikan inflasi di Indonesia, Bank Indonesia membentuk TIP yaitu Tim Pengendalian Inflasi. Tujuan dibentuknya TIP agar memantau, mengkoordinasi serta mengawasi setiap perkembangan inflasi di berbagai daerah di Indonesia. Awal pembentukan TPI belum diperluas ke berbagai daerah, pemerintah sadar akan pentingnya koordinasi inflasi sehingga diperluas ke berbagai daerah.

Di Indonesia terdapat 2 kebijakan dalam mengendalikan inflasi yaitu kebijakan moneter serta kebijakan fiskal. Setiap kebijakan ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Kebijakan moneter dilakukan pada saat mengalami inflasi. Kebijakan ini untuk menekan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya kebijakan fiskal dilakukan pada saat ekonomi mengalami kemerosotan daya beli pada masyarakat dan meningkatnya pengangguran. Kebijakan ini untuk membuat pertumbuhan suatu perekonomian menjadi lebih baik.

Selain dua kebijakan di atas, ada pula cara lain untuk mengendalikan inflasi ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah produksi serta meningkatkan jumlah barang yang ada di pasar. Adanya ketersediaan barang yang banyak serta beredar di masyarakat, dengan demikian kembalinya keseimbangan jumlah uang yang beredar.
2. Memudahkan barang impor masuk. Produsen dalam negeri tidak bisa memenuhi semua barang, maka dari itu memudahkan barang impor masuk merupakan salah satu solusi demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Contohnya dengan memudahkan izin masuk barang impor
3. Menjaga keseimbangan pendapatan masyarakat. Terjaganya pendapatan masyarakat ini merupakan suatu solusi agar menahan laju pertumbuhan inflasi
4. Menentukan Harga Maksimum. Ketika inflasi, meningkatnya harga barang yang tidak bisa terkendali
5. Pemantauan distribusi barang. Terhambatnya pendistribusian barang bisa menjadi salah satu penyebab meningkatnya harga di suatu wilayah. Adanya permintaan yang tinggi tidak bisa mengimbangi jumlah barang yang terbatas dikarenakan tersendatnya proses pendistribusian suatu barang.

Dalam mengendalikan inflasi tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, tetapi juga tugas masyarakat yang harus turut ikut berperan dalam mengatasi permasalahan inflasi. Ada beberapa upaya atau solusi yang bisa dilakukan masyarakat dalam mengendalikan inflasi diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Investasi melalui deposito. Ini adalah cara mengendalikan inflasi yang cukup mudah.
2. Mempunyai Tabungan. Jika deposito harus menunggu jatuh tempo jika dana ingin dicairkan, berbeda dengan tabungan yang kapan saja bisa dicairkan.
3. Siapkan Dana Darurat. Selain memiliki deposito dan tabungan dana darurat merupakan salah satu cara yang bisa mengendalikan inflasi. Dengan dana darurat maka deposito dan tabungan akan tetap terjaga jika suatu hal yang darurat terjadi.

Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Proses kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah yaitu pertama adanya instruksi dari Presiden, kemudian diteruskan kepada setiap Kementerian yang terkait dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan inflasi.

Selanjutnya, dari Bank Indonesia menginstruksikan kepada setiap Kepala Daerah, untuk Kota Medan diteruskan kepada Walikota Medan yang kemudian dilanjutkan kepada Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Medan. Pada tahap ini, Administrasi Perekonomian hanya memfasilitasi dan memonitoring/mengawasi setiap kegiatan yang dijalankan, dan untuk mencapai setiap sasaran yang telah direncanakan diperlukan kerja sama dengan dinas-dinas yang terkait.

Kiprah Tim Pengendalian Inflasi Daerah yaitu menilai sumber-sumber serta potensi tekanan inflasi dan akibatnya terhadap perolehan target inflasi, serta melakukan pengamatan terhadap penerapan prosedur yang dilalui dalam hal pengendalian inflasi. Akibatnya bisa menaikkan daya beli serta menurunkan laju pertumbuhan penduduk miskin di Kota Medan.

Tantangan pengendalian inflasi masih relatif sulit di masa yang datang. Maka dari itu TPID diharapkan bisa menaikkan keterampilan dalam menolong perolehan target inflasi nasional. Dengan tujuan mengakomodasikan kebutuhan tersebut, maka pada tanggal 2 April 2013, Kementerian Dalam Negeri sudah menciptakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor

027/1696/SJ tentang mengelola terjangkau nya Barang serta Jasa Di Daerah sebagai petunjuk bagi daerah dalam melaksanakan koordinasi TPID dalam menahan keseimbangan harga. Tugas serta kewajiban TPID seperti yang tercatat dalam lampiran Inmendagri yaitu:

1. Menentukan prosedur yang akan dilalui mengenai pengendalian inflasi daerah.
2. Meninjau serta menilai keefektifan kebijakan yang dipilih mengenai pengendalian inflasi daerah.
3. Melaksanakan penyelidikan pada sumber maupun potensi penekanan inflasi daerah.
4. Melaksanakan penyelidikan persoalan perekonomian daerah yang bisa menghambat keseimbangan harga serta keterjangkauan barang maupun jasa.
5. Mengenali dan menelaah persoalan perekonomian daerah yang bisa menghambat keterjangkauan barang maupun jasa di daerah.
6. Melaksanakan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta menyampaikan ajakan (moral suasion) kepada masyarakat tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam hal melindungi keseimbangan harga.

Ikhtiar pengendalian inflasi serta menciptakan keseimbangan harga daerah juga berdampak sangat baik bagi perekonomian serta masyarakat setempat. Dampak tersebut bisa didapatkan dengan terwujudnya keseimbangan harga daerah ialah:

1. Terpeliharanya daya beli maka bisa menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah
2. Terwujudnya kondisi yang mendukung pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatan usaha terutama investasi. Maka dari itu, bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah serta terciptanya lapangan pekerjaan baru.

Penilaian TPID Terbaik

Penilaian TPID terbaik bertujuan agar menilai efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan setiap wilayah. Kendati demikian ini juga bertujuan agar menyampaikan apresiasi atas peran aktif TPID dalam memelihara keseimbangan harga, yang dilakukan oleh TPID tingkat provinsi serta tingkat Kabupaten/Kota. Penilaian kinerja TPID lebih fokus pada beragam aspek koordinasi stabilitas harga yang dilakukan TPID, dalam usaha memelihara keseimbangan harga di daerah masing-masing sepanjang tahun penilaian.

Penilaian kinerja meninjau dua aspek umum diantaranya aspek proses serta aspek keluaran. Dalam mengevaluasi aspek proses, tim penilai meninjau dua komponen yaitu intensitas proses/kegiatan TPID, serta kualitas penerapannya. Sementara itu untuk aspek keluaran pengendalian inflasi, dievaluasi melalui realisasi inflasi akhir tahun, dan juga volatilitas inflasi bulanan yang terjadi.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sukses mendapatkan penghargaan TPID Award 2020. Ini diberikan oleh Pemerintah Pusat dikarenakan TPID Sumut dianggap yang terbaik dalam mengendalikan infasi di wilayah Sumatera.

Hal tersebut tersingkap pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Rapat ini juga hadir secara virtual oleh para kepala daerah dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award tahun 2021 yang sukses didapatkan oleh Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwasanya Pemerintah Provinsi Sumatera bersungguh-sungguh dalam mengupayakan pengendalian inflasi daerah yang sangat diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Dengan demikian, pencapaian ini diharapkan akan lebih memacu upaya penekanan pengendalian inflasi pada setiap Kota/Kabupaten di Sumatera Utara agar pencapaian inflasi yang lebih baik lagi bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan) dianggap mampu menghambat angka inflasi lewat kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Terutama dalam mengelola ketersediaan barang dan jasa serta keseimbangan harga sehingga kebutuhan masyarakat tetap bisa tersedia dan terpenuhi. (Pewarta Medan)

Pendekatan Penelitian Masing-masing Artikel

Poin ini menjabarkan artikel yang telah dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan tema penelitian untuk menganalisa setiap artikel yang didapatkan dengan tujuan untuk pemahaman yang lebih baik tentang tema yang diangkat. Artikel yang didapatkan oleh peneliti adalah artikel dari tahun 2006 hingga 2021. Total sebanyak 20 Artikel yang didapatkan oleh peneliti sebagai sumber referensi dalam mengerjakan penelitian ini. Jumlah artikel terbanyak yang didapatkan yaitu di tahun 2021.

Tabel 1. Artikel yang berkaitan dengan tema penelitian

Tahun	Jumlah Publikasi
2006	1
2012	2
2014	2
2015	2
2016	1
2017	1
2018	2
2019	2
2020	3
2021	4
Total	20

Penelitian ini juga mengupas, menelaah dan menjabarkan artikel yang didapat berdasarkan macam-macam subjek dari pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan publikasi artikel dari tahun 2006 sampai dengan 2021. Ada beberapa subjek penelitian diantaranya yaitu: TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), inflasi dan ekonomi moneter.

Tabel 2. Subjek Area Penelitian dari Masing-masing Artikel

Tahun	Subjek Artikel			Total
	TPID	Inflasi	Ekonomi Moneter	
2006	0	1	0	1
2012	0	1	1	2
2014	1	1	0	2
2015	1	1	0	2
2016	0	1	0	1
2017	1	0	0	1
2018	1	1	0	2
2019	0	2	0	2
2020	1	1	1	3
2021	1	2	1	4
Total	6	11	3	20

Berdasarkan tabel di atas, dalam publikasi jurnal dari tahun 2006 hingga 2021 subjek terbanyak yaitu mengenai inflasi berjumlah 11 artikel dari 20 jumlah keseluruhan artikel. Kemudian dilanjutkan dengan subjek TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) berjumlah 6 artikel dari 20 jumlah keseluruhan artikel. Lalu subjek Ekonomi Moneter yang berjumlah 3 artikel dari keseluruhan jumlah artikel yang didapatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pemaparan diatas sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah menciptakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar dapat mengendalikan inflasi yang terjadi pada Kota/Kabupaten dan provinsi seluruh Indonesia. Pengendalian inflasi merupakan faktor penting dan menjadi salah satu kepedulian pemerintah dikarenakan terdapat banyak dampak negatif dan kerugian yang dialami negara jika terjadinya inflasi.

Karena hal tersebut maka pemerintah membentuk TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dengan harapan bisa mengendalikan inflasi di berbagai daerah di Indonesia. Dengan harapan TPID mempunyai kinerja yang baik dan sama-sama memajukan perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutawiyaja, Zulfahmi. 2012. Pengaruh Faktor-faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia. *Organisasi dan Manajemen*. 8(2), 85-101.
- Amir Salim, dkk. 2021. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*. 7(1), 17-28.
- Atin Ramayani, dkk. 2020. Analisis Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Dalam Mengendalikan Inflasi Di Kota Tanjung Pinang Tahun 2019. *Student Online Journal*: 1(2), 228-236.
- B Hauriza, dkk. 2021. Prediksi Tingkat Inflasi Bulanan Indonesia Menggunakan Metode Jaringan Saraf Tiruan. *Teknologi dan Informasi*. 11(2), 152-167.
- Fedy Andrianus, Amelia Niko. 2006. Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Indonesia Periode 1997:3 – 2005:2. *11(2)*, 173-186.
- G.A. Diah Utari, dkk. 2015. *Inflasi Di Indonesia: Karakteristik dan Pengendaliannya*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia. Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Nomor 23 Tahun 2017.
- M. Natsir. 2012. *Ekonomi Moneter: Teori dan Kebijakan*. Semarang: Polines Semarang.
- M.B. Nani Ariani. 2018. *Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah: Studi Kasus Data Panel Di Indonesia*. *Bakti Masyarakat Indonesia*. 1(1), 76-82.
- Meita Nova Yanti Panjaitan, Wardoyo. 2016. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia. *Ekonomi Bisnis*. 21(3), 182-193.
- Nurul Jannah. 2020. Pengaruh Operasi Moneter Terhadap Inflasi Di Indonesia. *At-Tawassuth*. 5(1), 142-162.
- Pojaknas TPID. 2014. *Buku Petunjuk TPID*. Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pojaknas TPID).
- Reni Mulyani. 2020. Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam. *Lisyabah*. 1(2), 267-278.
- Samsul, dkk. 2019. Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al-Azhar; Islamic Economics*. 1(1), 16-28.
- Saparuddin Siregar. 2014. Politik Ekonomi Islam dalam Pengendalian Inflasi. *Human Falah*. 1(2), 1-23.
- Soni Fajar Mahmud. 2018. Analisis Peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Terhadap Perekonomian Dumai. *Unitex*. 11(1), 51-60.
- Surya Dharma. 2015. Analisis Peranan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terhadap Pengendalian Inflasi Di Provinsi Sumatera Utara. *Ekonomi dan Keuangan*: 3(4), 278-292.

- Triwahyuni. 2021. Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*. 6(2), 199-210.
- Vivi Monica Sari, dkk. 2021. Evaluasi Pengendalian Inflasi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2018. *Administrativa*. 3(2), 113-126.
- Yusra Mahzalena, Hijri Juliansyah. 2019. Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Ekonomi Regional Unimal*. 2(1), 37-50.